Journal Of Government Science
Volume 2 Issue 1, Januari 2026
E-ISSN: 3090-4803
Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang Ilmu Pemerintahan

Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe

Ni Komang Esiyuningsih[1)] *, Arsalim[2)], Joko Tri Brata[3)]

[1]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara
[2]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara
[3]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. esiyuningsih91@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Dinamika, Partisipasi Politik, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bentuk Partisipasii, Konawe

How to cite:

Ni Komang Esiyuningsih, Arsalim, Joko Tri Brata (2026). Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe

ABSTRACT

The Dynamics of Community Participation in the Election of Regent and Vice Regent in Konawe Regency." The objective of this study is to examine the dynamics of community participation in the election of the Regent and Vice Regent in Konawe Regency, as well as to identify the factors influencing political participation within the community. This research uses a qualitative descriptive method, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis technique employed is the interactive model. Research findings indicate the following: 1. Forms of Political Participation: 1). Voting*: Most citizens exercise their voting rights with varying motivations, including political awareness, social influence, and material incentives; 2).* Political Discussion*: This form of participation is more commonly observed among educated groups and individuals with access to political information; 3).* Political Campaigns*: Participation is generally driven by personal closeness to candidates or political parties, as well as pragmatic interests such as financial compensation. 2. Factors Influencing Political Participation; 1).* Education*: Educational attainment significantly affects political awareness and the quality of participation, with educated individuals more likely to engage rationally in politics; 2).* Socioeconomic Status*: Income and employment influence the extent to which individuals can engage in political processes. Those with stable economic conditions are more likely to participate actively, while lower-income groups are more vulnerable to transactional politics; 3). Political Parties and Campaign Teams: The activeness of political socialization efforts plays a crucial role in encouraging public participation; 4). Candidate Figures: The personal image and character of candidates are major factors influencing public political engagement; 5). Money Politics: This practice shifts participation from being awareness-based to interest-based, compromising the integrity of democratic engagement.*

1. Pendahuluan

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan menekankan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, salah satunya melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah wujud konkret dari pelaksanaan demokrasi di tingkat

lokal yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin secara langsung. Pelaksanaan Pilkada di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika, terutama dalam hal partisipasi masyarakat yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu daerah. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak hanya bermakna kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga mencerminkan kesadaran politik, pemahaman terhadap visi-misi calon kepala daerah, serta keterlibatan dalam proses politik secara lebih luas. Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi politik, dominasi elite politik, serta praktik-praktik seperti politik uang dan mobilisasi massa yang tidak sehat. Secara normatif, partisipasi politik merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2), serta secara teknis dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 adalah tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelenggara, peserta, pelaksanaan, hingga sengketa dan tindak pidana pemilu disamping itu, juga menekankankan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang partisipatif.

Dalam perspektif teori dikatakan bahwa suatu pemilihan umum pada pemilukada seperti partisipasi politik diperpengaruhi oleh pengambilan keputusan masyarakat kepada pasangan salah satu pasangan calon yang terpilih (Najib, et al., 2021). Begitu pentingnya peran masyarakat dalam pemilu khususnya pemilukada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota dan wakil bupati atau wakil walikota secara langsung partisipasi masyarakat merupakan komponen utama dalam menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pemilukada. Hal itu dipahami mengingat dalam pemilukada secara langsung tingkat partisipasi masyarakat yang datang ke bilik suara untuk memilih calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat menentukan

Dalam beberapa pelaksanaan Pilkada terakhir, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Konawe menunjukkan dinamika yang menarik. Terdapat fluktuasi angka partisipasi, di mana dalam satu periode angka partisipasi dapat meningkat, namun pada periode berikutnya justru mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, serta bagaimana pola dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Pilkada tersebut. Kabupaten Konawe sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Masyarakat di wilayah ini hidup dalam ikatan sosial yang kental dengan struktur tradisional dan kekeluargaan yang masih kuat. Hal ini sering kali berdampak pada cara mereka berpartisipasi dalam politik, di mana faktor hubungan personal, loyalitas etnis, dan patronase politik lebih dominan dibandingkan rasionalitas politik.

Kabupaten Konawe, sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara, melaksanakan Pilkada serentak pada 27 November 2024. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe mencapai 87,86%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Pilgub Sulawesi Tenggara yang mencatatkan 87,92% Meskipun angka ini menunjukkan partisipasi yang tinggi, masih terdapat tantangan dalam memastikan kualitas partisipasi tersebut. Dinamika partisipasi masyarakat di Konawe juga tidak terlepas dari faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik lokal. Misalnya, masih terdapat wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses informasi politik, rendahnya literasi politik masyarakat, hingga kuatnya pengaruh politik uang (*money politics*) dan politik identitas. Faktor-faktor ini berpotensi mempengaruhi referensi dan motivasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, peran aktor lokal seperti tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan media lokal juga menjadi elemen penting dalam membentuk partisipasi polittk masyarakat.

2. Tinjauan Pustaka

Partisipasi adalah penetuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Inu kencana Syafiier, 2015:141). Dalam konteks Pilkada, partisipasi dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat ikut terlibat dalam proses politik seperti memberikan suara, menghadiri kampanye, diskusi publik, hingga menjadi bagian dari penyelenggara atau pengawas pemilu. Partisipasi ini memiliki dimensi kuantitatif (jumlah partisipan) dan kualitatif (motivasi dan kesadaran politik).

Utman Abdul Mu'iz Ruslan (2000:46), menyatakan bahwa partisipasi politik adalah hasrat individu untuk mempunya peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administrative untuk menggunakan hak bersuara melibatkan dirinya berbagai organisasi, mendiskusikan berbagai persoalan politik dengan pihak lain ikut serat melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi independen atau ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri dan sebagainya.

Menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba (1963), budaya politik yang partisipatif akan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan budaya parokial atau subjek, partisipasi cenderung rendah karena minimnya kesadaran politik atau ketergantungan pada elite lokal. Konsep ini sangat relevan untuk melihat variasi partisipasi masyarakat di Konawe.

Dalam tataran regulatif, UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih dan dipilih dalam Pilkada. Penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu diberi tanggung jawab untuk memastikan inklusivitas dan integritas dalam proses tersebut. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan di lapangan. Secara sosiologis, partisipasi masyarakat dalam pemilu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, penghasilan, literasi politik, dan akses informasi. Hal ini diperkuat oleh pandangan Lipset (1959) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial akan meningkatkan kapasitas partisipasi politik warga.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam (*in-depth*), yaitu suatu data yang mengandung makna. (Sugiyono, 2010: 15). Jenis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya, yaitu menggam-barkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe dengan objek penelitian (situs peneltian pada Kelurahan Amonggedo dan Kelurahanan Amonggedo Baru Kecamatanan Amonggedo Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi penelitian terletak pada Kantor KPUD Kabupaten Konawe dengan objek atau situs penelitian pada pada Kelurahan Latoma dan Kelurahanan Amonggedo Baru Kecamatanan Amonggedo Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik penentuan atau penarikan informan menggunakan *purposive sampling* yakni pengambilan *sample* berdasarkan tujuan, dimana informan yang dipilih dianggap mengetahui informasi tentang fenomena yang diteliti (Kaelan, 2012). Informan terdiri dari yang memiliki peran dalam menyelenggarakan Pilkada yaitu dari pihak KPU, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua RT serta perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa betapa pentingnya salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya di wilayah administratif Kabupaten Konawe. Salah satu daerah yang juga mengikuti pemilihan kepala daerah serentak adalah di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dilaksana-kannya pemilihan kepala daerah serentak ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam memilih di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2020-2025. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2020, kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut atau kurangnya rasa antusias masyarakat terhadap pesta demokrasi yaitu seperti kegiatan kampanye yang diadakan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati di Kelurahan Latoma Kecamatan Unaaha dan di Kelurahaan Amonggedo Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe. Beda dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 lalu, masyarakat lebih antusias menggunakan hak suaranya untuk menentukan pilihannya.

Menurut Scumpeter (Damsar, 2010) bahwa partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu Negara. Dalam Negara demokratis, kedaulatan tinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi terdiri dari: pemberian suara (voting), diskusi politik, dan kampanye.

Adapun bentuk-bentuk Partisipasi Politik Masyarakat yang terdiri dari:

1. Pemberian Suara (Voting)

Pemberian suara atau voting merupakan bentuk partisipasi politik paling dasar dan umum dilakukan masyarakat dalam sistem demokrasi. Voting menunjukkan keterlibatan langsung individu dalam proses pemilihan pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka rutin memberikan suara dalam pemilu. Motivasi yang mendasari tindakan ini beragam, mulai dari kesadaran politik, dukungan terhadap figur tertentu, pengaruh lingkungan, hingga praktik politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan berbagai narasumber, dapat disimpulkan bahwa pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik paling umum dan paling mudah diamati dalam masyarakat. Voting menjadi indikator utama partisipasi politik karena secara langsung menunjukkan keterlibatan warga negara dalam proses pemilihan pemimpin dan penentuan arah kebijakan publik.

Sebagian besar masyarakat menyadari pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu atau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe. Motivasi dalam memberikan suara beragam, antara lain:

a. Kesadaran sebagai warga negara, yang merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menentukan masa depan daerah atau negara.
b. Dukungan terhadap figur calon, berdasarkan kedekatan emosional, popularitas, atau program kerja yang dianggap sesuai.
c. Pengaruh politik uang, yang masih menjadi praktik umum di beberapa wilayah dan mendorong partisipasi meskipun bukan karena kesadaran politik yang murni.
d. Tekanan sosial atau lingkungan, seperti ajakan keluarga, tokoh masyarakat, atau kelompok tertentu untuk datang ke TPS.

Meskipun angka partisipasi melalui voting terbilang tinggi, kualitas partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemilih yang rasional dan sadar politik. Hal ini menunjukkan bahwa voting sebagai indikator partisipasi politik bersifat kuantitatif, namun perlu ditopang dengan pendidikan politik agar berdampak secara kualitatif terhadap demokrasi.

Dengan demikian, pemberian suara (voting) merupakan indikator penting dalam mengukur keterlibatan masyarakat dalam politik, namun perlu terus ditingkatkan dari segi kesadaran, pemahaman, dan kemandirian dalam menentukan pilihan politik.

2. Diskusi Politik;

Adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Keberadaan partai politik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan sampai kepelosok-pelosok desa/kelurahan sedikit banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Diskusi politik merupakan bentuk partisipasi yang lebih reflektif, karena melibatkan pertukaran gagasan, opini, dan informasi antarwarga. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat secara aktif mendis-kusikan isu-isu politik dalam berbagai konteks, baik formal maupun informal.

Diskusi ini terjadi di warung kopi, forum warga, arisan, bahkan media sosial. Masyarakat membahas calon, program, kebijakan pemerintah, hingga kondisi politik nasional. Diskusi seperti ini membantu memperluas pema-haman politik, membentuk opini, dan mendorong masyarakat menjadi pemilih yang lebih rasional. Teori partisipasi politik menyatakan bahwa keterlibatan dalam diskusi memperkuat budaya politik partisipatif, di mana warga tidak hanya pasif, tetapi aktif dalam membentuk sikap politik. Namun, tantangan yang muncul adalah masih terbatasnya literasi politik dan maraknya disinformasi, terutama di media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa diskusi politik merupakan salah satu indikator penting dari partisipasi politik masyarakat, terutama dalam hal pembentukan opini, kesadaran politik, dan penyebaran informasi. Diskusi politik dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai konteks dan bentuk, antara lain:

a. Diskusi informal di lingkungan sosial, seperti obrolan di warung, pos ronda, arisan, dan forum warga.
b. Diskusi formal, seperti rapat RT/RW, pertemuan tokoh masyarakat, atau forum musyawarah yang turut membahas kebijakan publik dan isu-isu politik lokal.
c. Diskusi di ruang digital, terutama di kalangan pemuda dan pemilih muda, melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan X (Twitter), yang menjadi sarana menyampaikan pandangan dan membagikan informasi politik.

Diskusi politik berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif, memperluas pemahaman masyarakat terhadap isu politik, dan mendorong terciptanya pilihan yang lebih rasional dalam pemilu. Melalui diskusi, masyarakat dapat saling bertukar pandangan, mempertanyakan program calon, hingga membentuk sikap politik terhadap isu-isu lokal maupun nasional.

Namun, tingkat intensitas dan kualitas diskusi masih bervariasi tergantung pada pendidikan, akses informasi, dan minat politik masing-masing individu. Di beberapa kelompok masyarakat, diskusi politik masih bersifat pasif atau bahkan dipengaruhi oleh informasi yang kurang valid (hoaks), khususnya di media sosial.

Dengan demikian, indikator diskusi politik menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya berbentuk tindakan langsung seperti voting atau kampanye, tetapi juga dalam bentuk keterlibatan wacana yang berkontribusi terhadap kualitas demokrasi.

3. Kampanye

Kampanye merupakan indikator partisipasi politik aktif, di mana masyarakat terlibat langsung dalam proses pemilu melalui dukungan terhadap calon atau partai politik. Bentuk keterlibatan ini bisa berupa menjadi relawan, menghadiri acara kampanye, menyebarkan informasi, hingga membuat konten kampanye di media sosial. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi dalam kampanye tidak hanya dilakukan oleh kader partai, tetapi juga oleh simpatisan yang percaya pada calon tertentu. Kampanye digital juga menjadi tren, terutama di kalangan anak muda, yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan dukungan atau menyebarkan program kandidat.

Adalah bentuk kegiatan organisasi peserta pemilu yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan Bupati danWakil Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kampanye politik merupakan salah satu indikator penting dari partisipasi politik masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kampanye menunjukkan adanya kesadaran dan minat untuk berkontribusi dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi dalam kampanye terlihat dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Menjadi relawan tim sukses, baik dalam bentuk teknis lapangan seperti memasang atribut kampanye, membagikan selebaran, maupun membantu logistik dan pengorganisasian acara.
b. Menghadiri kegiatan kampanye, seperti pertemuan warga, panggung terbuka, dan sosialisasi calon.
c. Berpartisipasi dalam kampanye digital, terutama di kalangan pemuda, melalui pembuatan dan penyebaran konten politik di media sosial.
d. Menjadi simpatisan pasif, yaitu masyarakat yang tidak terlibat langsung, namun mengikuti dan mendukung kampanye melalui diskusi, partisipasi dalam acara, atau penyebaran informasi.
e. Partisipasi dalam kampanye ini tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif politik murni. Sebagian masyarakat terlibat karena kedekatan dengan calon, adanya imbalan, atau sekadar ikut-ikutan. Namun demikian, keterlibatan tersebut tetap mencerminkan bahwa kampanye menjadi salah satu saluran utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, indikator kampanye dapat dijadikan tolok ukur penting dalam menilai tingkat partisipasi politik aktif masyarakat, sekaligus mencerminkan bagaimana hubungan antara calon, partai politik, dan warga terbangun selama proses pemilihan berlangsung.

Berdasarkan wawancara oleh beberapa informan hal di atas menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye baik yang dilakukan partai politik maupun pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan kampanye. Hal itu terjadi karena waktu dari penyelenggaraan kegiatan kampanye bersamaan dengan waktu kerja masyarakat yang pada umumnya sebagai Petani dan buruh/swasta, dan masyarakat beranggapan tidak ikut dalam kegiatan kampanye tersebut karena kurangnya sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Konawe dalam pelaksanaan kegiatan kampanye Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Konawe. Dan beberapa masyarakat beranggapan masih ada janji politik yang belum terealisasi oleh salah satu pasangan calon Bupati yang pernah menjadi pemimpin di Konawe seperti pengaspalan dan masih banyak hal lainya, sehingga masyarakat beranggapan janji politik yang di sampaikan pada saat kampanye belum tentu akan di realisasi, Jadi dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam kampanye pada pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Konawe, karena banyak masyarakat yang tidak ikut berkampanye.

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi dalam kampanye tidak hanya dilakukan oleh kader partai, tetapi juga oleh simpatisan yang percaya pada calon tertentu. Kampanye digital juga menjadi tren, terutama di kalangan anak muda, yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan dukungan atau menyebarkan program kandidat.

Ketiga indikator tersebut voting, diskusi politik, dan kampanye menun-jukkan bahwa partisipasi politik masyarakat memiliki dimensi yang beragam, dari yang bersifat formal dan langsung (voting), hingga yang informal dan tidak langsung (diskusi dan kampanye). Tingkat dan

kualitas partisipasi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, sosial ekonomi, akses informasi, dan pengaruh lingkungan sekitar.

Dengan memahami ketiga indikator ini secara holistik, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya diukur dari kuantitas kehadiran di TPS, tetapi juga dari keterlibatan dalam proses politik secara menyeluruh, baik melalui komunikasi politik maupun aksi nyata dalam mendukung calon atau gagasan politik tertentu.

Hal ini sejalan dengan teori Scumpeter dalam Damsar, (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi elektoral merupakan wujud nyata keterlibatan warga dalam sistem politik. Juga hasil penelitian ini sejalan dengan pendekatan Mc Closky (1968**)** yang menekankan pentingnya kesukarelaan dalam partisipasi politik. Artinya, masyarakat akan berpartisipasi jika merasa bahwa suaranya berharga dan akan membawa perubahan. Dalam banyak kasus, rendahnya partisipasi mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pejabat sebelumnya. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik dalam bentuk pemberian suara, diskusi politik, maupun keterlibatan dalam kegiatan politik lainnya.

Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. (1984), sendiri membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu; 1. konvensional dan 2. Non Konvensional akan tetapi secara substansial mendukung hasil penelitian ini. Termasuk pendapat dari Surbakti (2015), mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai wewenang) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelak-sanaan keputusan politik. Pemilihan umum pada pilkada langsung adalah wujud nyata dari pembentukan demokratisasi di daerah.

Sementara terkait dengan Faktor-faktor yang mempegaruhi partisipasi masyarakat dalampemilihanBupati dan Wakil Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor seperti pendidikan, kondisi sosial ekonomi, peran partai politik dan tim kampanye, figur calon, serta praktik money politic memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Pembahasan hasil penelitian ini mengacu pada kerangka teori dari Rosnia Gosango (2010) yang menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan sosial dan politik.

Adapun Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

1. Pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif terhadap partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemungkinannya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilu, mengikuti kampanye, atau berdiskusi mengenai isu-isu publik. Mempengaruhi pengetahuan politik untuk ikut berpartisipasi dalam memilih, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tajam pula seseorang dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan-persoalan sosial yang diterima semakin meningkat dan menciptakan minat dan kemampuannya dalam berpolitik

Pendidikan memengaruhi kesadaran politik dan kemampuan kritis masyarakat dalam menilai kebijakan, tokoh politik, dan program-program partai. Masyarakat yang lebih terdidik cenderung tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu emosional atau politik uang, serta memiliki orientasi yang lebih rasional dalam memilih.

2. Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi—yang mencakup pendapatan, pekerjaan, dan status sosial—berperan penting dalam membentuk partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke atas menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan rendah.

Kondisi ekonomi yang stabil memberikan waktu dan sumber daya bagi individu untuk terlibat dalam aktivitas politik. Sebaliknya, masyarakat berpenghasilan rendah sering kali lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga partisipasi politik dianggap bukan sebagai prioritas. Namun, kelompok ini juga lebih rentan terhadap pengaruh politik transaksional.

3. Partai Politik dan Tim Kampanye

Keaktifan partai politik dan tim kampanye dalam menjangkau masyarakat turut memengaruhi partisipasi politik. Penelitian ini menemukan bahwa partai yang aktif melakukan sosialisasi, dialog terbuka, serta kampanye yang mendidik, mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam politik. Tim kampanye yang hanya fokus pada pencitraan dan mobilisasi sesaat menjelang pemilu cenderung tidak memberikan dampak jangka panjang terhadap partisipasi politik.

4. Figur Calon

Karakter dan citra calon legislatif atau kepala daerah merupakan salah satu faktor penentu penting dalam keputusan politik masyarakat. Figur yang dianggap bersih, merakyat, dan berpengalaman cenderung lebih menarik minat pemilih untuk berpartisipasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih berdasarkan figur calon, bukan karena partai atau program. Hal ini menunjukkan bahwa politik Indonesia masih sangat dipersonalisasi. Keberhasilan tokoh dalam membangun hubungan emosional dan kepercayaan dengan masyarakat menjadi kunci mening-katnya partisipasi.

5. Money Politik

Praktik money politik masih menjadi realitas dalam proses politik lokal, khususnya menjelang pemilu. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mempertimbangkan imbalan materi sebagai faktor dalam menentukan pilihan politiknya. Meskipun money politik meningkatkan partisipasi dalam arti kuantitatif (tingginya angka pemilih), tetapi tidak serta merta mencerminkan partisipasi yang berkualitas. Partisipasi yang dibangun di atas dasar transaksional cenderung bersifat jangka pendek dan tidak mendukung tumbuhnya kesadaran politik yang sejati.

5. Kesimpulan

Dinamika partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Konawe di wilayah penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi menunjukkan adanya keterlibatan yang kompleks dan berlapis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Partisipasi tidak hanya tercermin dalam aktivitas memberikan suara di TPS, tetapi juga melalui diskusi politik dan keterlibatan aktif dalam proses kampanye. Tingkat dan bentuk partisipasi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor structural maupun kultural. Secara umum mayoritas rutin menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan bupati dan wakil bupati meski motivasinya beragam, mulai dari kesadaran oilitik hingga dorongan ekonomi melalui praktek money politik. Tingkat pendidikan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kulaitas partisipasi, dimana masyarakat vberpendidikan lebih tinggi lebih rasional dan aktif dalam proses politik, termasuk diskusi pengawasan.

Sebaliknya, kondisi social ekonmi menjadi penhghambat partisipasi aktif, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan lebih rendah yang lebih fokus pada kebutuhan dasar. Peran partai politik dan kampanyae turut menentukan keberhasilan mobilisasi pemilih, terutama melalui pendekatan langsung an sosialisasi intensif. Selain itu, personalitas calon (figur) menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan memilih, menunjukkan kuatnya orientasi politik yang bersifat personal ketimbang ideologis. Di sisi lain praktik politik uang masih menjadi realitas yang cukup mencolok, terutama alam menggerakkan masyarakat yang apatis untuk dating

memberikan hak suara nya ke TPS. Diskusi politik terjadi dalam ruang-ruang informal mauoun media social menhjadi cerminan berkembangnya budya politik dan mendorong pemilih menjadi lebih kritis, meskipun masih dihadapakan pada tantangan rendahnya literasi politik dan maraknya disinformasi. Partisipasi dalam kampanye juga menunjukkan keterlibatan aktif sebagian masyarakat, baik sebagai relawan, peserta acara, maupun penyebar informasi di media sosila. Ini mengindikasikan adanya segmentasi partisipasi politik yang lebih luas, meskipun belum merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe besrifat dinamis dan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor individu, sosial, dan stuktural. Meskipun tingkat partisipasi menunjukkan angka yag cukup tinggi dibanding pemilihan bupati dan wakil bupati di periode sebelummnya, partisipasi kuantitatif tampak tinggi, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan politik, penguatan literasi, dan penghapusan praktik-praktik transaksional.

Referensi

Adawiyah, R., Najib, M., & Ali, M. M. (2021). *Information Effect on Organic Vegetable Purchase Interest through Consumer Preferences and Awareness.* Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8.

Ahmadi, Ruslan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik (Tingkah Laku. Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ambo Upe, S. M., 2008. Sosiologi Politik Kontemporer. Jakarta: Prestasi pustaka raya.

A. Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, 2015, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan Pembaharuan Tata Pemerintahan*, Jakarta.

A. Ramlan Surbakti, dkk, 2008, *Sistem Pemilu dan Tatanan Politik Demokrasi*, Kemitraan, Jakarta.

Almond, Gabriel A. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku, dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi,. Konstitusi Press, Jakarta.

Budiardjo Miriam, 2008, *Dasar-dasar ilmu politik* (edisi revisi), Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Budiardjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta.

Dwi Sulisworo. (2012). Demokrasi dalam Pendidikan. Jurnal Demokrasi dan Pendidikan. (Dikutip dari Studocu dan repositori institusi).

Gosango, Rosnia. 2010. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan* Kepala Desa. Mamuya KecamatanGalela Kabupaten Halamahera Utara.

Hasba, S., & Syahrul, S. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Bungguosu, Konawe.

Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1990). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwi Sulisworo, 2012, Demokrasi, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012; Universitas Ahmad Dahlan.

Cangara, Hafied. (2011). Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo

Inu Kencana Syafiie, 2015. Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Halu Oleo. Febrissya, T., & Irawaty. (2020). *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada di Desa Lasuai, Konawe Selatan*. Jurnal Mores, Universitas Halu Oleo.

Kabupaten Konawe Dalam Angka, 2024

Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.

Kecamatan Amonggedo Dalam Angka, 2024

Kecamatan Unaaha Dalam Angka, 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. (2020).

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe. Unaaha: KPU Konawe.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook,* Edition 3. USA: Sage Publications.

Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe, 2024.

Nuraini, E. (2015). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia*. Jurnal Politik, 1(2), 45-59.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Dapat diakses melalui: https://peraturan.go.id atau https://jdih.kpu.go.id

Sa'ban, L. M. A., & Wijaya, A. A. M. (2015). *Perilaku Golput di Kabupaten Wakatobi*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Republik Indonesia. (2016).

Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana,* Universitas PGRI Semarang Press, Semarang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Lembaran Negara RI Tahun 2016.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 adalah tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia